



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 1862-1881

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tantangan dan Peluang China dalam Penerapan Kebijakan Politik Luar Negeri di Afghanistan yang Dipimpin Taliban Sejak Tahun 2021-2024

Elsafan

Universitas Paramadina

Email: elsafan@students.paramadina.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk, peluang dan tantangan terkait kebijakan politik luar negeri China di Afghanistan yang dipimpin Taliban Sejak Tahun 2021-2024. Meskipun China dan Afghanistan telah menjalin hubungan diplomatik sejak lama, namun kebijakan luar negeri China terhadap Afganistan terlihat lebih pasif. Era pemerintahan Xi Jinping yang dimulai tahun 2013 membawa arah perubahan kebijakan luar negeri China menuju arah yang lebih prokatif. Bersamaan dengan visi "China Dream" yang digaungkan oleh pemerintahan Xi, China mulai berperan aktif dalam urusan global. Proyek-proyek kerjasama antar negara, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur dan konektivitas, yang dikenal dengan nama *Belt and Road Initiative*, mulai digencarkan. Demi mendukung proyek tersebut, yang juga merupakan perwujudan dari kepentingan nasional China, pemerintah China berusaha untuk membangun kerjasama dengan negara-negara di kawasan, termasuk dalam hal ini Afghanistan. Situasi Afghanistan pasca berkuasanya Taliban menghadirkan beragam peluang dan tantangan bagi China. Sumber daya alam yang melimpah, relasi yang telah terjalin baik menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan. Namun keterbatasan sumber daya manusia yang handal, infrastruktur serta instabilitas keamanan menjadi tantangan bagi China untuk menjalankan kebijakan politik luar negerinya di Afghanistan.

Kata Kunci: *China, Afghanistan, Taliban, Belt and Road Initiative*

Abstract

This study aims to analyze the various forms, opportunities, and challenges related to China's foreign policy towards Taliban-led Afghanistan from 2021 to 2024. Although China and Afghanistan have long established diplomatic relations, China's foreign policy toward Afghanistan has appeared relatively passive. However, the era of Xi Jinping's leadership, which began in 2013, marked a shift toward a more proactive foreign policy direction. Alongside the "China Dream" vision promoted by Xi's administration, China began to take a more active role in global affairs. International cooperation projects, particularly in the fields of infrastructure development and connectivity—collectively known as the Belt and Road Initiative—have been increasingly promoted. In support of this initiative, which also represents China's national interests, the Chinese government has sought to build cooperation with countries in the region, including Afghanistan. The situation in Afghanistan following the Taliban's rise to power presents both opportunities and challenges for China. Abundant natural resources and previously established diplomatic ties represent opportunities to be leveraged. However, the lack of skilled human resources, underdeveloped infrastructure, and ongoing security instability pose significant challenges for China in implementing its foreign policy in Afghanistan.

Keywords: *China, Afghanistan, Taliban, Belt and Road Initiative*

PENDAHULUAN

Hubungan antar negara negara di dunia selalu diwarnai dengan fenomena yang bersifat ketergantungan maupun dominasi. Meskipun setiap negara sebenarnya memiliki kedaulatan, namun hal itu tidak berarti mereka terisolasi atau terkucil dari satu sama lain. Sebaliknya, mereka saling berdampingan dan saling mempengaruhi dan karenanya harus menemukan cara untuk hidup berdampingan dan berinteraksi satu sama lain (Jackson & Sorensen, 1999).

Dalam proses saling mempengaruhi tersebut, ada negara yang memiliki kekuatan lebih besar dibanding dengan negara lainnya. Negara-negara dengan kekuatan besar dalam hubungan internasional adalah negara-negara yang memiliki pengaruh ekonomi, militer, dan politik yang besar, yang memungkinkan mereka untuk membentuk tatanan global dan norma-norma internasional. Dominasi mereka sering kali ditandai oleh kemampuan mereka untuk memproyeksikan kekuatan di luar batas negara mereka dan untuk mempengaruhi sistem internasional.

Secara keseluruhan, pengaruh kekuatan besar terhadap negara-negara berkembang dalam hubungan internasional menciptakan dinamika yang kompleks. Negara-negara berkembang tidak hanya menjadi objek dari kebijakan luar negeri negara-negara besar,

tetapi juga berperan aktif dalam membentuk hubungan tersebut melalui diplomasi dan kerjasama yang strategis (Bainus & Rachman, 2018).

China, yang telah meningkatkan kapabilitas ekonomi dan militernya dalam dekade terakhir, menginisiasi proyek infrastruktur berskala global yang bernama *Belt and Road Initiative* (BRI). Melalui proyek infrastruktur besar-besaran di negara-negara berkembang, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan rel kereta api, China berusaha untuk memperluas pengaruhnya secara ekonomi dan politik. Negara-negara seperti Pakistan dan Sri Lanka telah menerima investasi besar dari China, yang tidak hanya meningkatkan infrastruktur mereka tetapi juga mengikat mereka dalam hubungan ekonomi yang lebih dekat dengan Beijing (Zhang, 2019). Afghanistan, yang baru mengalami perubahan rezim politik di tahun 2021 lalu, juga tidak lepas dari target kebijakan luar negeri China.

Tidak lama setelah Amerika Serikat menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan, terjadi krisis politik yang mengakibatkan Presiden Afghanistan terpilih Ashraf Ghani jatuh dari pemerintahannya dan diambil alih oleh Taliban. Transfer kekuasaan ini tidak melalui dialog intra-Afghanistan seperti yang diharapkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, melainkan merupakan konsekuensi dari kemenangan militer Taliban di lapangan yang akhirnya menyebabkan jatuhnya Kabul, ibukota Afghanistan, pada 15 Agustus 2021 (Anugerah, 2021).

Pengambilalihan Kabul oleh Taliban mengakibatkan perubahan kekuasaan yang cepat dan tiba-tiba di Afghanistan. Taliban membangun kendali mereka di hampir semua provinsi Afghanistan dalam waktu singkat. Setelah mengambil alih Kabul, mereka mengumumkan pemerintahan sementara dengan para pemimpin penting Taliban sebagai anggota kabinet (Faheem, 2022).

Segera setelah pengambilalihan, Taliban meninggalkan sistem politik yang ada dan konstitusi Afghanistan yang menyediakan dasar dari keseluruhan struktur pemerintahan di Afghanistan. Taliban datang dengan sistem politik berdasarkan pandangan dunia dan aspirasi politik mereka yang terinspirasi oleh interpretasi syariat Islam yang ketat. Pemerintahan dan sistem yang baru ini memicu reaksi yang beragam dari dunia internasional. Banyak negara-negara yang tidak mengakui pemerintahan Taliban, namun ada juga yang tetap berhubungan dengan Taliban meskipun tidak mengakui legitimasi Taliban secara terang-terangan (Faheem, 2022).

Sejak diumumkan pada tahun 2013, BRI telah menjadi sangat penting dalam agenda Presiden China, Xi Jinping. Pada Mei 2017, Forum *Belt and Road* berlangsung dan Afghanistan, bersama dengan perwakilan dari lebih dari 100 negara, berpartisipasi dalam

acara tersebut. Selama forum ini, China menandatangani perjanjian kerja sama dengan 68 negara dan organisasi internasional. Xi menyatakan bahwa China bertujuan untuk menemukan katalis baru untuk ekspansi ekonomi, membangun *platform* baru untuk kemajuan di seluruh dunia, dan mengembalikan keseimbangan dalam proses globalisasi ekonomi (Xinhua, 2017).

BRI bertujuan untuk mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan, mendorong pertumbuhan dan kemakmuran bersama. Ia berfungsi sebagai jalan menuju perdamaian dan persahabatan, dicapai melalui peningkatan saling pengertian, kepercayaan, dan pertukaran komprehensif. Pemerintah China mendukung gagasan perdamaian dan kolaborasi, bersikap terbuka dan inklusif, dan terlibat dalam pembelajaran timbal balik dan saling menguntungkan. Ini mendorong kolaborasi praktis di semua bidang dan upaya untuk membentuk komunitas bersatu berdasarkan kepentingan, takdir, dan tanggung jawab bersama. Komunitas ini menumbuhkan rasa saling percaya politik, integrasi ekonomi, dan inklusivitas budaya (*The State Council of The People's Republic of China*, 2015).

Lebih lanjut, Afghanistan telah menunjukkan antusiasme untuk berpartisipasi dalam program Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC), dan duta besarnya untuk Pakistan, Omar Zakhilwal, telah menyatakan dukungan Afghanistan untuk CPEC. Mereka yang mendukung keterlibatan Afghanistan dalam CPEC secara khusus, serta BRI pada umumnya, berpendapat bahwa bangsa ini akan menuai keuntungan berikut dengan menjadi bagian dari upaya besar-besaran ini. Pertama, infrastruktur baru di Pakistan dapat memberi bisnis dan investor Afghanistan akses ke pasar konsumen di Asia Selatan, sehingga mengurangi biaya impor dan meningkatkan ekspor ke wilayah tersebut. Ini dapat membantu Afghanistan meningkatkan perdagangannya dengan negara-negara regional, sehingga menstabilkan ekonominya (Khalil, 2017).

Pada tahun 2015, Pakistan adalah tujuan ekspor utama Afghanistan (US\$ 392 juta), diikuti oleh India (US\$ 277 juta). Demikian pula, Pakistan muncul sebagai importir teratas Afghanistan, dengan perdagangan sebesar \$ 1,95 miliar, diikuti oleh China (US\$ 587 juta) dan India (US\$ 560 juta). Sejauh ini Afghanistan telah mengekspor barang-barang seperti karpet, karpet, buah-buahan kering, dan tanaman medis. Tapi bukan tembaga, bijih besi, dan sumber daya alam lainnya. BRI diharapkan untuk menawarkan kesempatan bagi Afghanistan untuk mengekspor ini dan barang berharga lainnya sumber daya ke pasar di Asia Tengah, China, Asia Barat, dan sebagian Eropa dengan mana Afghanistan tidak berdagang secara luas saat ini (Chandran, 2017).

Beberapa ahli dari Afghanistan berpendapat bahwa integrasi Afghanistan ke dalam BRI akan memberi negara kemampuan untuk mengejar stabilitas ekonomi dengan meningkatkan peluang perdagangan, menghubungkan dengan jaringan kereta api dan jalan regional, muncul sebagai mitra penting di pasar energi regional, dan memerangi perdagangan narkoba regional (Mudabber, 2016). Selain manfaat ekonomi tersebut, partisipasi dalam BRI diharapkan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas Afghanistan. Afghanistan memandang China sebagai penjaga perdamaian yang lebih besar di negara itu. Pada Januari 2015, Presiden Ashraf Ghani mengungkapkan harapannya agar China, yang merupakan negara yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik di kawasan tersebut, untuk membawa perdamaian ke Afghanistan (Roy, 2017).

Kepentingan China dalam mengasumsikan peran baru yang ditingkatkan ini dapat dikaitkan dengan empat faktor, seperti menjaga investasinya di negara itu, menangkalkan kegiatan ekstremis kelompok-kelompok yang dipandang sebagai ancaman serius bagi situasi keamanan internal China sendiri, terutama di Xinjiang, mengamankan koridor bagi China untuk memperluas jangkauannya ke Eropa, dan mendapatkan akses ke berbagai sumber daya alam. Afghanistan memiliki deposit mineral senilai hampir US\$ 1 triliun, yang mencakup bijih besi, tembaga, kobalt, emas dan logam industri penting seperti lithium. Jika Afghanistan stabil, maka negara ini bisa diubah menjadi salah satu pusat pertambangan terpenting di dunia (Risen, 2010).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data umumnya dilakukan melalui penelaahan dokumen, pengamatan perilaku, atau penggalian informasi melalui wawancara dengan informan (Creswell dan Creswell, 2018).

Dari berbagai data yang diperoleh dari lapangan, barulah peneliti mengabstraksikannya ke dalam teori dan konsep. Tujuan penggunaan teori bukanlah untuk menggeneralisasi, akan tetapi menginterpretasikan atau mengonstruksikan makna dari suatu realitas. Dalam praktik penelitian ini, sebagaimana konsep dasar penelitian kualitatif, peneliti menganalisa dokumen-dokumen (kepustakaan) guna memahami isu-isu seputar penerapan kebijakan luar negeri China di Afghanistan yang dikuasai Taliban sejak tahun 2021. Setelah itu, penulis mengamati siapa saja aktor yang berperan dalam kerja sama tersebut. Hasil analisa tersebut peneliti gunakan untuk memaknai bagaimana kebijakan luar negeri yang diterapkan China melalui aktor-aktornya.

Jenis Penelitian

Salah satu jenis penelitian dalam pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis inilah yang menurut peneliti relevan dengan tujuan dari penelitian ini. Jenis penelitian deskriptif menyediakan gambaran rinci tentang situasi, keadaan, atau relasi (Neuman, 2014). Karena memilih jenis penelitian deskriptif, penelitian ini, misalnya, tidak hanya menjelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan luar negeri China di Afghanistan, akan tetapi juga menjelaskan bagaimana peran, persepsi, dan strategi yang dilakukan setiap aktor tersebut.

Sumber dan Jenis Data

Seperti yang telah dijelaskan, sumber data untuk penelitian ini berasal dari dokumen, buku, artikel jurnal, dan hasil pengamatan. Dokumen yang dimaksud, antara lain berupa perjanjian, pengumuman lembaga pemerintah, dll. Pengamatan dilakukan melalui berbagai kanal pemberitaan mengenai kebijakan luar negeri China di Afghanistan.

Berkaitan dengan jenis data, pada umumnya dikenal data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang peneliti peroleh secara langsung dari lembaga pemerintah China terkait kebijakan luar negeri, sedangkan data sekunder peneliti peroleh dari hasil penelitian terdahulu, pemberitaan, dan opini-opini seputar kebijakan luar negeri China di Afghanistan dan relasi China-Afghanistan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan bagi Pemerintah China

Penerapan kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain tentunya akan menghadirkan tantangan bagi negara tersebut. China dalam hal ini, berusaha untuk mempertahankan hubungan luar negerinya dengan Taliban, meskipun hingga saat ini belum ada satu negara pun yang mengakui pemerintahan Taliban secara formal. Naiknya Taliban ke sebagai penguasa di Afghanistan menimbulkan perubahan-perubahan dalam hukum dan peraturan di tatanan masyarakat serta membawa implikasi bagi hubungan luar negeri antara Afghanistan dengan negara-negara lainnya, termasuk China.

1. Tantangan Sosial Politik

Dalam pertemuan dengan negara-negara tetangga Afghanistan, China menyepakati bahwa Taliban perlu mengambil langkah-langkah berkelanjutan yang diperlukan di Afghanistan untuk memastikan hak-hak perempuan dan pendidikan anak-anak, meningkatkan penghidupan masyarakat, melindungi hak-hak dasar semua warga

Afghanistan, termasuk kelompok etnis, perempuan dan anak-anak (Kementerian Luar Negeri China, 2022). Inklusivitas dalam pemerintahan Taliban menjadi tantangan bagi pemerintah China karena China menginginkan dukungan internasional dalam pemulihan kembali Afghanistan.

Transisi kekuasaan yang damai di Afghanistan juga menjadi kepentingan China, yang tengah menjadi kekuatan global. Di sisi lain, perdamaian di Afghanistan akan membantu kawasan tersebut berkembang karena Afghanistan terletak di persimpangan Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Perdamaian di Afghanistan juga penting bagi China untuk memenuhi tujuan ekonomi regionalnya. Afghanistan di satu sisi dapat berfungsi sebagai persimpangan antara China dan mitra geostrategis dan geoekonominya, Iran. Etnis dan sektarianisme merupakan dua faktor sosial-politik penting yang menjadi syarat bagi masa depan politik Afghanistan (Kakar, et al., 2022).

Kemampuan Taliban yang telah teruji di medan perang tidak tercermin dalam kapasitas untuk memerintah negara, yang penduduknya mengalami kemerosotan dramatis dalam kondisi kehidupan, ditambah lagi pembekuan aset dan pemotongan bantuan internasional setelah pengambilalihan Taliban. Harapan bahwa Taliban telah menjadi kekuatan moderat pupus oleh pengumuman kabinet baru. Alih-alih mewakili tatanan sosial Afghanistan, kabinet tersebut tidak mencakup satu pun perempuan dan sebagian besar dibentuk oleh suku Pashtun, dan mengabaikan kelompok etnis Afghanistan lainnya (Boni, 2022). Pengambilalihan ini juga mengakibatkan terjadinya eksodus pekerja terampil di Afghanistan. Banyak yang hengkang sebelum penarikan pasukan AS dan asing pada Agustus 2021, dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa era reformasi demokrasi dan sosial di Afghanistan akan berakhir. Hilangnya pekerja terampil berdampak pada sektor kesehatan, pendidikan, keamanan, dan peradilan di Afghanistan (Scollon, 2022).

Ketika Taliban membentuk kabinet pertamanya pada 07 September 2021, tidak memasukkan satupun perempuan dalam susunan kabinet tersebut. Kabinet tersebut justru didominasi oleh anggota kelompok senior Taliban (Al Jazeera, 2021). Perempuan Afghanistan menghadapi pembatasan serius yang diberlakukan oleh rezim Taliban atas nama hukum Syariah. Perempuan tidak diperbolehkan bepergian sendiri. Selain itu, anak perempuan tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan. Pelanggaran hak-hak perempuan ini berdampak serius bagi rezim Taliban karena masyarakat internasional tidak dapat mentoleransi sikap ini (Barr, 2021). Pemerintahan Taliban melarang anak perempuan untuk menempuh pendidikan menengah dan tinggi. Selain itu, mereka telah menerapkan undang-undang dan peraturan baru pada media dan kelompok non pemerintah lokal dan

internasional, sehingga membatasi operasi mereka dan menuai kecaman signifikan dari pengamat luar. Semua kegiatan politik telah dilarang, dan sebagian besar pemimpin politik oposisi telah meninggalkan negara tersebut. Sebanyak 3.053 organisasi sosial dan 2.091 organisasi non pemerintah internasional dan nasional yang terdaftar di Kementerian Kehakiman telah menjadi sasaran hukum dan pembatasan yang ketat (Bertelsmann Stiftung, 2024).

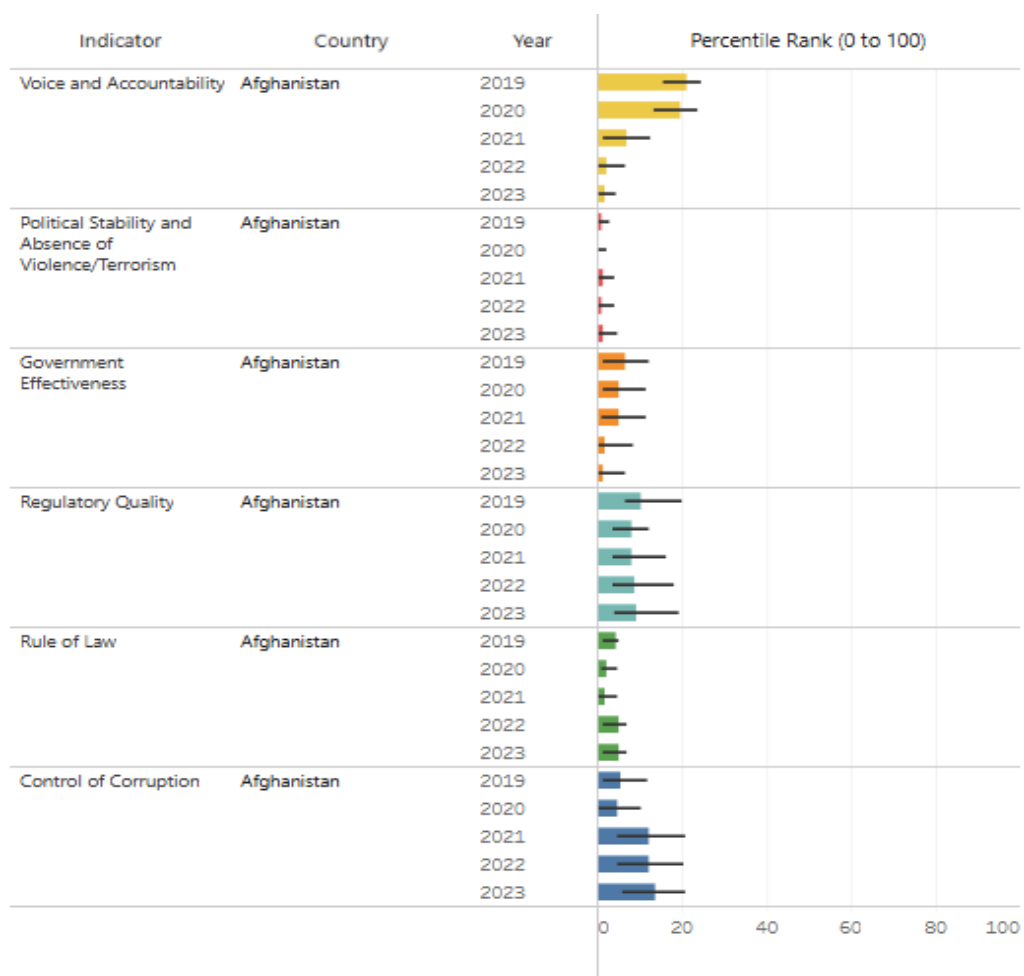
Taliban melarang perempuan dari kegiatan berekspresi ruang publik, termasuk juga ikut dalam aktivitas hiburan, berpartisipasi dalam olahraga dan hadir di stadion (*Times of India*, 2021). Pada bulan Desember 2022, pembatasan ini diperketat dengan larangan bagi perempuan untuk bekerja di organisasi non pemerintah. Pada bulan April 2023, larangan ini diperluas untuk pekerja PBB setempat (Loft, 2023). Pada 20 Agustus 2024, Taliban mengumumkan bahwa pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Afghanistan, Richard Bennett, dilarang memasuki negara tersebut. Keputusan ini muncul sebagai reaksi atas laporannya tentang situasi hak asasi manusia di Afghanistan, yang oleh Taliban digambarkan sebagai informasi yang menyesatkan dan tidak akurat dan bersifat propaganda (Tolonews, 2024). Pelarangan ini masih terus berlangsung hingga tahun 2024, bahkan Kementerian Perekonomian memperingatkan akan mencabut izin organisasi non pemerintah yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku di Afghanistan (Al Jazeera, 2024).

Afghanistan adalah negara yang beragam secara etnis dan bahasa dengan struktur tradisional dan berbasis komunitas yang kuat. Masyarakat Afghanistan mampu mengatasi pemerintahan yang buruk dan kurangnya lembaga resmi karena pengaturan informal yang mendominasi kehidupan sehari-hari. Keberadaan dewan adat dan jaringan keagamaan menciptakan pengaruh signifikan pada lanskap sosial negara tersebut. Masyarakat Afghanistan menyelesaikan masalah di dalam dan di antara masyarakat dan dipilih secara informal oleh suku atau kelompok etnis. Mereka telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tatanan sosial di Afghanistan untuk waktu yang lama dan tetap berakar kuat dalam masyarakat Afghanistan saat ini. Hegemoni etnis Pashtun dalam kabinet Taliban menghambat kepercayaan di antara kelompok etnis Afghanistan lainnya, khususnya kelompok minoritas. (Bertelsmann Stiftung, 2024).

2. Tantangan Ekonomi

Secara historis, pertumbuhan ekonomi dan investasi Afghanistan terhambat oleh masalah tata kelola. Peringkat Afghanistan pada Indikator Tata Kelola Seluruh Dunia yang dipublikasikan oleh Bank Dunia mencerminkan hal tersebut. Dalam indikator tersebut, Bank

Dunia menggunakan enam indikator pengukuran, diantaranya kebebasan berpendapat dan akuntabilitas; stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan atau terorisme; efektivitas pemerintahan; kualitas hukum dan penegakan hukum; undang-undang dan peraturan; serta kontrol terhadap korupsi. Tahun 2020, satu tahun sebelum Taliban mengambil alih pemerintahan di Afghanistan misalnya, tingkat kebebasan berpendapat dan akuntabilitas Afghanistan berada pada ranking 19 dari skala 0-100 (0 angka terendah, 100 angka tertinggi). Namun, setelah Taliban berkuasa pada 2021, ranking tersebut turun drastis menjadi ranking 1. Begitu juga dengan indikator efektivitas pemerintahan, pada tahun 2020 Afghanistan berada pada ranking 5, pada tahun 2022 dan 2023 turun menjadi ranking 1 (World Bank, 2024).



Gambar 1. Kualitas Pemerintahan Afghanistan 2019-2023 (World Bank, 2024)

Kemampuan Taliban di medan perang tidak sebanding dengan kemampuan mereka untuk mengelola negara. Pemerintahan Taliban berjuang menghadapi serangkaian krisis sosial dan ekonomi, termasuk ekonomi yang jatuh bebas dan krisis kemanusiaan yang mengkhawatirkan. Dari sudut pandang ekonomi, salah satu reaksi pertama dari dunia

internasional terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban adalah pembekuan sebagian besar bantuan internasional ke negara tersebut. Miliaran Dollar bantuan pembangunan berhenti mengalir ke Afghanistan dalam hitungan hari, membuat negara tersebut terisolasi secara finansial. Departemen Keuangan Amerika Serikat membekukan sekitar US\$ 9 miliar cadangan bank sentral Afghanistan. Dana itu ditempatkan di bank-bank internasional untuk mendukung agar nilai mata uang Afghanistan tetap terjaga. Amerika Serikat menyatakan bahwa Taliban tidak akan dapat mengakses stok dana yang tersimpan ini, dan juga telah melarang pengiriman uang tunai ke Afghanistan (Musumeci, 2021). Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) menangguk akses Afghanistan ke dukungan keuangan sampai Taliban diakui oleh masyarakat internasional sebagai otoritas politik yang sah; Bank Dunia juga menghentikan pencairan dananya ke Afghanistan (UNDP, 2022).

3. Tantangan Keamanan

Dalam aspek keamanan, pemberantasan organisasi teroris akan menjadi tugas berat bagi pemerintahan Taliban saat ini. Para pemimpin Taliban juga bersikukuh bahwa tidak ada organisasi teroris yang akan diizinkan mengeksploitasi wilayahnya untuk melakukan aksi teroris terhadap negara lain. Di sisi lain, Taliban tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memerangi kelompok-kelompok teroris ini (Kakar, et al., 2022). Kelompok teroris yang berlokasi di Afghanistan tersebut diantaranya *Islamic State-Khorasan Province* (ISKP), *Al Qaeda*, *Tehrik-e-Taliban Pakistan* (TTP), *Islamic Movement of Uzbekistan* (IMU), *Eastern Turkistan Islamic Movement* (ETIM) (Thomas, 2024).

Meski begitu, PBB mencatat bahwa insiden keamanan menurun hingga mencapai 91 persen dibanding tahun 2020, khususnya di periode Agustus-Desember 2021. Jumlah insiden keamanan turun signifikan setelah 15 Agustus, dari 600 menjadi kurang dari 100 insiden per minggu. Data juga menunjukkan bahwa bentrokan bersenjata menurun hingga 98 persen, dari 7.430 menjadi 148 insiden; serangan udara sebesar 99 persen, dari 501 menjadi 3; jumlah ledakan sebesar 91 persen, dari 1.118 menjadi 101; dan pembunuhan sebesar 51 persen, dari 424 menjadi 207. Wilayah timur, tengah, selatan, dan barat Afghanistan menyumbang 75 persen dari semua insiden yang tercatat. Meskipun kekerasan berkurang, otoritas Taliban juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk meningkatnya serangan terhadap anggota mereka sendiri. Kelompok-kelompok ini telah beroperasi secara sporadis di Provinsi Panjshir dan distrik Andarab di Provinsi Baghlan. Konflik internal di

kalangan Taliban sendiri juga terjadi dan mengakibatkan kekerasan, seperti bentrokan bersenjata antara pasukan Taliban di kota Bamyān pada 4 November (UNOCHA, 2022).

Wilayah perbatasan juga menjadi fokus Taliban dalam mengonsolidasikan kendali mereka atas wilayah perbatasan di tengah kekhawatiran negara-negara tetangga bahwa kelompok-kelompok ekstremis mungkin melancarkan serangan ke wilayah mereka dari tanah Afghanistan. Ketegangan dan insiden keamanan juga terjadi di wilayah perbatasan Afghanistan dengan negara-negara tetangganya. Dengan Iran misalnya, terjadi konflik perbatasan pada tahun 2021, 2022 (Motamendi, 2022), dan tahun 2023 (Al Jazeera, 2022). Pada akhir Desember 2021 dan awal Januari 2022, pasukan Taliban terlibat konflik dengan militer Pakistan dalam upaya mereka untuk memagari sebagian besar perbatasan Afghanistan-Pakistan sepanjang 2.600 km (Zardykhān, 2022). Konflik dengan Pakistan kembali pecah pada September 2024 (RFE, 2024). Konflik perbatasan dengan Turkmenistan juga terjadi pada Januari 2022 (Tolonews, 2022).

Dari sudut pandang keamanan China, perubahan situasi di Afghanistan dapat memicu efek berantai, dan bahaya terbesar yang dapat muncul adalah dari terorisme dan masuknya peredaran narkotika ke China. China telah lama memfokuskan keamanan perbatasannya dengan Afghanistan. Hal ini dipicu oleh ancaman keamanan yang berasal dari Afghanistan, dan kedekatannya dengan wilayah otonom Xinjiang. Di Xinjiang, Beijing mencurigai adanya kelompok teroris potensial di antara minoritas Muslim Uighur dan karena itu telah mengambil serangkaian langkah keamanan ekstrem baru untuk memperketat kendali atas orang Uighur, termasuk membentuk kamp interniran. Pemerintah China melihat kelompok teroris, khususnya Gerakan Islam Turkistan Timur (ETIM), yang mengupayakan kemerdekaan bagi Xinjiang, sebagai ancaman terbesar bagi keamanan nasional. (Fischer, et al., 2021).

China perlu terus mencermati masalah Afghanistan, mempertimbangkan berbagai pilihannya, dan menyusun strategi untuk mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan. Perdamaian di negara tetangga Afghanistan adalah kepentingan terbaik mereka, dan upaya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh keluarnya AS dari Afghanistan dilakukan agar kepentingan nasional China tidak terhalang. Fleksibilitas China terhadap Taliban perlu diimbangi dengan kehati-hatian, dan dipengaruhi oleh stabilitas politik dan ekonomi internal Taliban, serta kebijakan luar negerinya. China tentu menginginkan pemerintahan Taliban yang moderat di Afghanistan yang akan menjaga stabilitas dalam negeri dan membina hubungan positif dengan negara-negara tetangga.

Peluang bagi Pemerintah China

Dibalik berbagai tantangan yang dihadapi China dalam menerapkan kebijakan luar negerinya, situasi di Afghanistan pasca berkuasanya Taliban juga membuka banyak peluang yang mendukung China untuk menjalankan kebijakan luar negerinya. Meskipun sistem sosial-politik, norma, nilai, budaya, dan agama antara China dan Afghanistan berbeda, China tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taliban sejak Agustus 2021, bahkan China tetap membuka operasional kantor kedutaannya di Kabul disaat banyak negara menutup kantor kedutaannya setelah pengambilalihan Taliban (Henley & Burke, 2021). Kebijakan ini menyiratkan bahwa China ingin terus berhubungan dan bekerjasama dengan Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban. Pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, transportasi, serta investasi menjadi peluang bagi China untuk memuluskan kepentingan nasionalnya, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan dominasi dan pengaruh China di kawasan Asia. Jika stabilitas di Afghanistan dapat terwujud melalui pembangunan di berbagai bidang, maka hal tersebut akan membawa dampak positif bagi pemerintah China.

BRI adalah ambisi ekonomi internasional terbesar China yang bertujuan merangsang pembangunan ekonomi di wilayah luas yang meliputi sub wilayah di Asia, Eropa dan Afrika, yang menyumbang 64% dari populasi dunia dan 30% dari PDB dunia. Proyek ini dirancang untuk melanjutkan tren pertumbuhan China yang signifikan (Huang, 2016).

Konektivitas telah menjadi elemen kunci China dalam membangun kekuatan nasional dan memberikan pengaruh ke dunia global. Mengembangkan interkoneksi pembangunan infrastruktur merupakan bagian utama dari strategi nasional BRI China untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Asia dan sekitarnya, menguasai pasar dan rantai pasokan industri, serta meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi bilateral di negara-negara anggota BRI. China memiliki keyakinan yang kuat bahwa siapapun yang mengendalikan rute konektivitas antar wilayah akan mendominasi dunia di abad ke-21 (Yu, 2024).

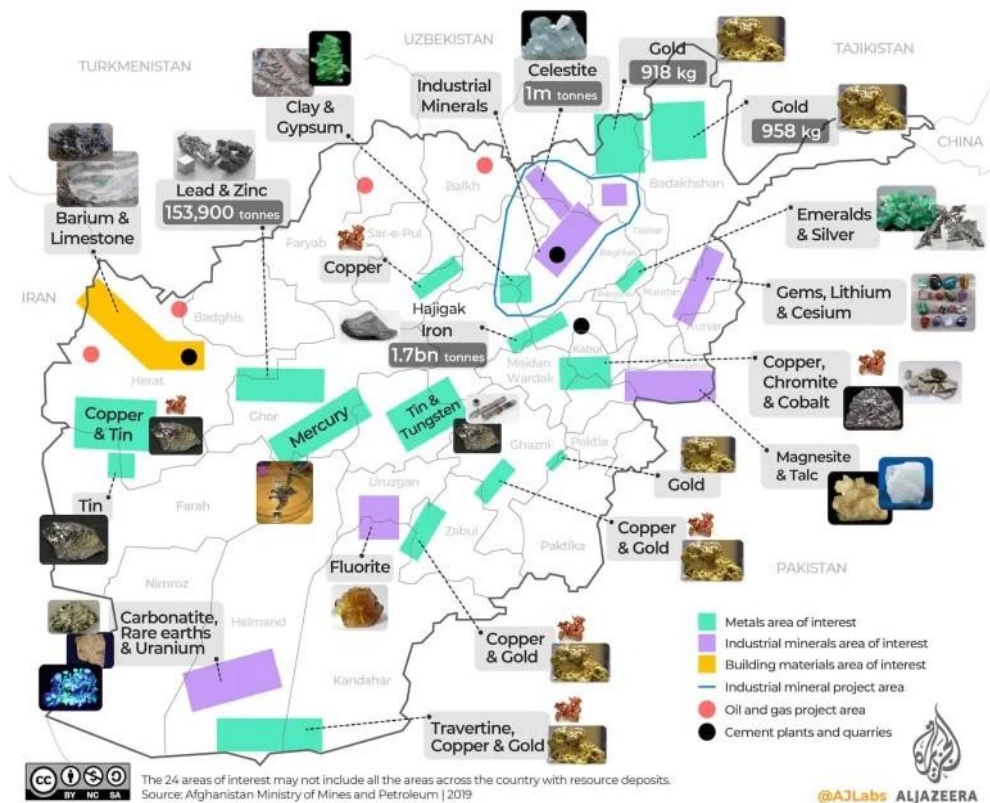
Minat baru China dalam memimpin ekspansi ekonomi internasional dipicu oleh tiga faktor. Pertama, BRI merupakan kebijakan penting Tiongkok untuk mempertahankan pertumbuhannya, dengan menjajaki bentuk-bentuk baru kerja sama ekonomi internasional dengan mitra-mitra baru. Meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat selama 3 dekade dalam reformasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi China semakin melambat dan telah mencapai titik jenuh. Dalam BRI, China dapat mencari peluang ekonomi baru di wilayah barat, mendukung pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan. Kedua, China juga berkeinginan untuk memperbesar pengaruh dan kontribusinya pada arsitektur ekonomi internasional dan menawarkan diri sebagai alternatif yang lebih baik dibanding peran lembaga moneter internasional maupun Bank Dunia. Ketiga, meskipun pembangunan infrastruktur merupakan elemen penting dari BRI, namun BRI dirancang lebih kompleks daripada itu. BRI juga mencakup dialog kebijakan, konektivitas infrastruktur, perdagangan tanpa hambatan, dukungan keuangan, dan pertukaran antar masyarakat internasional (Huang, 2016).

Mengingat pengalaman China sendiri dalam pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur kemungkinan akan memainkan peran mendasar dalam mendorong kerja sama regional. Sejumlah besar proyek, seperti pembangunan rel kereta api berkecepatan tinggi, jaringan pipa minyak dan gas, serta jaringan telekomunikasi dan listrik, telah direncanakan untuk diimplementasikan dalam koridor BRI (Huang, 2016).

Tahun 2024 mencatat keterlibatan tertinggi BRI sepanjang sejarah, dengan kontrak konstruksi senilai USD 70,7 miliar dan investasi senilai USD 51 miliar; keterlibatan China terkait energi pada tahun 2024 merupakan yang ter hijau secara absolut dan relatif dalam periode apapun sejak dimulainya BRI, mencapai USD 11,8 miliar, meningkat 60% dibandingkan tahun 2023 (Nedopil, 2025).

Wilayah Afghanistan telah menjadi sasaran China dalam mengembangkan proyek BRI nya. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Lokasi strategis Afghanistan di jantung Asia dianggap sebagai mata rantai penting dalam inisiatif BRI, yang menghubungkan Asia Tengah dengan Asia Selatan dan Timur Tengah (Khalil, 2017). China memiliki kepentingan yang signifikan di Afghanistan karena berbatasan langsung dengan China, dan menyediakan gerbang bagi China untuk mengakses Asia Barat, Timur Tengah, dan Eropa. Afghanistan merupakan faktor penting dalam stabilitas dan keamanan regional, dan kepentingan ekonomi China terletak pada sumber daya mineralnya yang kaya (Dkhar, et al., 2023).



Gambar 2. Peta Kekayaan Mineral Afghanistan (Al Jazeera, 2021)

Afghanistan yang berlokasi di persimpangan lempeng tektonik Himalaya, Iran, dan Asia Tengah memiliki keragaman geologis tertinggi di dunia dan kaya akan endapan mineral, namun banyak yang belum dimanfaatkan. Menurut laporan yang dipublikasikan oleh Survei Geologi AS, ada sekitar 2,2 miliar ton besi, 1,4 juta ton unsur tanah jarang, dan jutaan ton tembaga (Earth Site, 2024). Hasil penelitian ini tentu saja menumbuhkan minat dari China untuk melakukan eksplorasi di Afghanistan.

Meskipun Afghanistan kaya dengan sumber daya alam yang belum dimanfaatkan, rezim Taliban tidak memiliki tenaga ahli dan mesin untuk mengubah sumber daya ini menjadi aset yang lebih bernilai. Zhao Haihan, kuasa usaha Kedutaan Besar China di Afghanistan menyatakan bahwa peluang ini akan dimanfaatkan pemerintah China untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada pekerja Afghanistan agar mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan (Xing & Xiaojing, 2023).

China juga membutuhkan dukungan penuh Taliban untuk keberhasilan proyek BRI. Dan menjadi otoritas Afghanistan saat ini, menyambut baik dan ingin ikut serta dalam proyek ambisius China tersebut. Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid dilaporkan mengklarifikasi bahwa pemerintahnya bersedia bergabung dengan BRI. China berupaya memainkan peran proaktif secara diplomatik dan politik untuk membantu menciptakan stabilitas dan kondisi damai di Afghanistan. Ini akan membantu China dalam memajukan

proyek-proyeknya dan memainkan peran yang berpengaruh dalam mengartikulasikan dan membentuk struktur pemerintahan di Afghanistan (Jain, 2021).

Sejak Amerika Serikat meninggalkan Afghanistan pada tahun 2021, perhatiannya terhadap negara tersebut memudar dan hampir menghilang. Ketiadaan otoritas dan pasukan Amerika Serikat di Afghanistan dimanfaatkan oleh China untuk memajukan kepentingannya dan memanfaatkan kekosongan kekuasaan. Ketika Taliban merebut kembali kekuasaan di Afganistan pada tanggal 15 Agustus 2021, China berada di garis terdepan dibanding negara besar lain dalam kerjasama dengan rezim Taliban. China dengan cepat beradaptasi dengan peralihan kekuasaan tersebut, menahan diri untuk tidak mengutuk perbuatan Taliban yang dianggap banyak negara sebagai tindakan yang tidak sah, dan tetap membuka kantor kedutaannya. China telah mempertahankan kontak diplomatik yang luas dengan para pemimpin Taliban dan meskipun belum diberikan pengakuan resmi, pemerintahan Taliban diizinkan untuk membuka kantor perwakilan diplomatik di Beijing (EFSAS, 2023).

Berbanding terbalik dengan tahun 2002, China terlihat ingin memainkan peran utama di Afghanistan saat ini. Beijing juga ingin meningkatkan kepentingan ekonominya yang substansial, namun sebagian besar belum terealisasi akibat pendudukan Amerika Serikat di Afghanistan. Pergerakan China membuahkan hasil, dimana hanya dalam waktu hitungan bulan setelah Taliban kembali berkuasa, kontrak untuk proyek-proyek yang gagal dijalankan di bawah pemerintahan Republik berturut-turut, seperti proyek tambang Aynak dan Amu Darya, kembali ditinjau dan ditandatangani. Akses terhadap cadangan lithium, yang menjadi salah satu komponen penting dalam pembuatan kendaraan listrik, menjadi prioritas bagi ekonomi China. Perusahaan-perusahaan China juga telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di sektor pertanian dan infrastruktur, termasuk proyek-proyek pembangkit listrik (EFSAS, 2023).

Perjalanan kereta api pertama antar kedua negara diwujudkan pada 23 November 2024, dengan membawa berton-ton kargo dan menempuh perjalanan selama 22 hari. Hubungan ekonomi China dan Afghanistan semakin intens. Perdagangan antar kedua negara pada tahun 2023 mencapai \$1,3 miliar, meningkat pesat sebesar 125 persen dari tahun-tahun sebelumnya. China juga membuka peluang peningkatan perekonomian kedua negara, dengan menandatangani kebijakan bebas tarif 100 persen untuk produk dagang yang berasal dari Afghanistan. Hal ini akan memberikan Afghanistan kesempatan untuk memperluas ekspornya (Ali, 2024).

SIMPULAN

Kebijakan luar negeri yang diterapkan China di Afghanistan merupakan kelanjutan dari pola historis, yang dalam kaitannya dengan Afghanistan muncul lebih kuat setelah tahun 2021. Adalah fakta bahwa tanpa lingkungan yang relatif stabil di Afghanistan, China tidak dapat memperoleh keuntungan dari investasinya. Namun, juga benar bahwa investasi dan peningkatan pembangunan suatu negara mengurangi risiko pemberontakan, yang berpotensi menjadikannya hubungan yang saling menguntungkan. China telah mengalami aksi-aksi terorisme, khususnya yang dilakukan oleh Gerakan Islam Turkistan Timur (ETIM) di Xinjiang.

Ketidakstabilan dan berbagai organisasi teroris yang berkumpul di Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban yang sedang mencoba menata kembali Afghanistan dapat menimbulkan ancaman. Oleh karena itu, China melakukan pendekatan yang lebih proaktif terhadap Afghanistan setelah Taliban menguasai negara tersebut. Aspek keamanan ini menjadi penunjang untuk mendukung aspek ekonomi yang juga menjadi kepentingan nasional China.

Paham Realisme, yang menekankan pada sifat negara yang mementingkan dirinya sendiri di tengah-tengah dunia yang anarki, benar-benar diterapkan oleh China. Disaat banyak negara yang memutuskan hubungan dengan Taliban, China justru tetap membuka kantor kedutaannya di Kabul, bahkan tetap berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Taliban. China bahkan menjadi negara yang pertama kali menunjuk duta besar baru untuk Afghanistan setelah Taliban berkuasa. China juga aktif tampil di forum organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN), Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO), Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) untuk mendorong keterlibatan Internasional dalam membangun kembali Afghanistan dan membuka kembali aset-aset Afghanistan yang dibekukan oleh Amerika Serikat sejak Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan.

China selalu berfokus pada kepentingan nasionalnya untuk menjaga agar proyek BRI tetap berjalan dengan baik di kawasan Asia, khususnya Asia Tengah, Barat, Timur dan Selatan yang berbatasan langsung dengan Afghanistan. Kepentingan-kepentingan ini tampaknya condong ke arah perlindungan jangka panjang atas investasi struktural di Afghanistan. Tujuan untuk memperoleh sumber daya alam penting seperti minyak dan tembaga dari sumber yang dekat, serta penggabungan Afghanistan ke dalam Kerjasama Ekonomi China-Pakistan (CPEC) BRI yang penting secara ideologis, tampaknya menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan Beijing. Hal ini diperkuat oleh berbagai investasi

dan kesepakatan yang telah terjadi meskipun situasi politik di Afghanistan tidak sempurna.

Tesis ini memberikan wawasan tentang motivasi dan prioritas yang mendorong keterlibatan China di Afghanistan sejak tahun 2021. Bagi China, tidak masalah dengan siapa ia bernegosiasi, selama ia dapat mengejar tujuannya. Saat ini, proyek-proyek besar seperti tambang minyak Amu Darya kembali berjalan, yang menyiratkan bahwa China meningkatkan fokusnya terhadap Afghanistan. China memandang situasi Afghanistan saat ini sebagai lingkungan yang potensial.

Tantangan dan peluang yang muncul dalam penerapan kebijakan luar negeri China merupakan hal yang tak terhindarkan. Oleh karena itu China tidak hanya membuka komunikasi dengan Taliban, namun juga dengan negara-negara yang berbatasan dengan Afghanistan, yang juga akan menopang kepentingan China di Afghanistan. Kelancaran program BRI dengan sendirinya akan memperkuat hegemoni China di kawasan Asia dan tentu saja akan meningkatkan kapasitas ekonomi dan militer China untuk menghadapi berbagai persoalan internal dan eksternal China.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeera (2023). At Least Three Killed in Shooting at Iran-Afghan Border. Diakses 24 April 2025 dari: <https://www.aljazeera.com/news/2023/5/27/clash-on-iran-afghan-border-kills-at-least-three>
- Ali, G. (2024). China Deepens Its Engagement With Taliban-Ruled Afghanistan. Diakses 25 April 2025 dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2024/12/china-deepens-its-engagement-with-taliban-ruled-afghanistan/>
- Anugerah, B. & Purba, J. (2021). Kondisi Politik dan Keamanan Afghanistan di Bawah Rezim Taliban dan Signifikansinya terhadap Geopolitik Global. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(3). <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i3.399>
- Bainus, A., & Rachman, J. (2018). Editorial: Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal Of International Studies*, 2(2), 109-115. doi:10.24198/intermestic.v2n2.1
- Barr, H. (2021). The Fragility of Women's Rights in Afghanistan. Diakses 22 April 2025 dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2021/08/17/fragility-womens-rights-afghanistan>
- Bertelsmann Stiftung. (2022). BTI 2024 Country Report — Afghanistan. Diakses 22 April 2025 dari https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2024_AFG.pdf
- Boni, F. (2021). Afghanistan 2021: Us Withdrawal, The Taliban Return and Regional Geopolitics. *Asia Maior*, 32. <https://doi.org/10.52056/9791254690994/17>
- Chandran, A.G. (2017). Why Afghanistan Should Join CPEC. Diakses 11 Desember 2024 dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2017/05/why-afghanistan-should-join-cpec/>

- Creswell, J.W. and Creswell, J.D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications Ltd.
- Faheem, F., Hussain, S., & Qmar, M. T. R. (2022). The US Withdrawal from Afghanistan and its impacts on the Pak-Afghan relationship. *Journal of Humanities, Social and Management Sciences (JHSMS)*, 3(1). <https://doi.org/10.47264/idea.jhsms/3.1.37>
- Fischer, S., & Stanzel, A. (2021). Afghanistan: The West fails - a win for China and Russia? The views from Beijing and Moscow, SWP Comment, No. 50/2021, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin, <https://doi.org/10.18449/2021C50>
- Henley, J., & Burke, J. (2021). China to Keep Kabul Embassy Open and 'Beef Up' Relations, Say Taliban. Diakses 24 April 2025 dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2021/sep/03/china-to-keep-kabul-embassy-open-and-beef-up-relations-say-taliban>
- Huang, Y. (2016). Understanding China's Belt & Road Initiative: Motivation, framework and assessment. *China Economic Review*, 40, 314–321. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2016.07.007>
- Jackson, R., & Sorensen, Georg. (1999). *Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University
- Jain, B.M. (2021). China's Geostrategic Engagement in A New Afghanistan. Diakses 25 April 2025 dari <https://eastasiaforum.org/2021/10/08/chinas-geostrategic-engagement-in-a-new-afghanistan/>
- Kakar, J.-U.-D., Fatima, J., & Anwar, M. W. (2022). China-Taliban Relations, Perceptions and Engagement: A Case of Taliban's Politico-Economic Predicaments. *Pakistan Journal of Social Research*, 04(02). <https://doi.org/10.52567/pjsr.v4i2.550>
- Khalil, A.B. (2017). Linking Afghanistan to China's Belt and Road. Diakses 11 Desember 2024 dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2017/04/linking-afghanistan-to-chinas-belt-and-road/>
- Motamendi, M. (2022). Border Fight Between Iran and Taliban Kills One: Afghan Official. Diakses 24 April 2025 dari Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2022/7/31/border-fight-iran-taliban-afghanistan>
- Mudabber, Z. (2016). Where Does Afghanistan Fit in China's Belt and Road? Diakses 11 Desember 2024 dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2016/05/where-does-afghanistan-fit-in-chinas-belt-and-road/>
- Musumeci, N. (2021). The Taliban Tried to Get Their Hands on The Afghan Central Bank's Nearly \$10 Billion In Reserves, But Most of The Money Is In New York. Diakses 24 April 2025 dari <https://www.businessinsider.com/federal-reserve-bank-of-new-york-holds-billions-from-afghanistan-2021-8>
- Nedopil, C. (2025). *China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2024*. Griffith Asia

- Institute and Green Finance & Development Center, FISF, Brisbane. DOI: 10.25904/1912/5784
- Roy, M. S. (2017). Afghanistan and the Belt and Road Initiative: Hope, Scope, and Challenges. *Asia Policy*, 24, 103–109. <https://www.jstor.org/stable/26403208>
- Scollon, M. (2022). Brain Drained: Exodus Of Professionals Since Taliban Takeover Leaves Afghanistan Starting from Scratch Again. Diakses 22 April 2025 dari Radio Free Europe: <https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-brain-drain-workforce-anniversary/31983884.html>
- The European Foundation for South Asian Studies. (2023). Extension Of China's Belt and Road Initiative into Afghanistan Is a Risky Venture, But It Merits the Close Attention of The US. Diakses 25 April 2025 dari EFSAS: <https://www.efsas.org/commentaries/extension-of-china%E2%80%99s-bri-into-afghanistan/>
- Thomas, C. (2024). Terrorist Groups in Afghanistan. Diakses 24 April 2025 dari <https://www.congress.gov/crs-product/IF10604>.
- Tolo News. (2024). Travel Ban Imposed on UN's Richard Bennett by Islamic Emirate. Diakses 23 April 2025 dari Tolonews: <https://tolonews.com/afghanistan-190324>
- Xinhua. (2024). Chinese-Aided Housing Project Starts in Kabul. Diakses 20 April 2025 dari Xinhua: <https://english.news.cn/20240408/7bf63484eea84dc798815657f1da4254/c.html>
- Yu, H. (2024). Reflections on the Belt and Road Initiative at Its 10th Anniversary. https://doi.org/10.1007/978-981-99-9633-9_11
- Zardykhan, Z. (2022). Border Clashes in Afghanistan since the Taliban Takeover. Eurasian Research Institute. Weekly E-Bulletin No. 339
- Zhang, F. (2022). China's New Engagement with Afghanistan after the Withdrawal. *LSE Public Policy Review*, 2(3). <https://doi.org/10.31389/lseppr.52>.